

Siaran Pers  
**Untuk Segera Dimuat**

**Logika Keliru**

Cukai rokok naik 23%, industri rokok pasti kolaps (Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia).

***Tahukah Bapak, kenaikan cukai rokok sebesar 200% di Amerika Serikat pada tahun 1898 untuk membiayai perang Spanyol-Amerika (Richard Kluger, 1997) tidak membuat industri rokok di Amerika Serikat kolaps. Mereka bertahan sampai saat ini, bahkan berekspansi ke Indonesia. Phillip Morris mengakuisisi PT HM Sampoerna pada Maret 2005.***

Cukai rokok naik, mengancam lapangan kerja (Enny Sri Hartati, Pengamat Ekonomi)

***Tahukah Ibu, lapangan kerja buruh rokok terancam karena mekanisasi industri, bukan cukai. Satu mesin linting dapat menggantikan 900 buruh linting. Petani tembakau Indonesia terancam karena impor masif daun tembakau. 2/3 daun tembakau yang ada di pasar Indonesia berasal dari impor (Data Badan Pusat Statistik, 2011)***

**Informasi Menyesatkan Tentang Cukai Rokok**

Dalam sebuah program yang ditayangkan oleh salah satu TV swasta nasional pada tanggal 25 September 2015 jam 9:30 – 10:00 pagi, pemirsa terpaksa mendengarkan tayangan keliru yang mendukung industri rokok dan merugikan rakyat Indonesia. Padahal, menurut data WHO, kini tiap hari sekitar 500 orang Indonesia mati karena penyakit yang berhubungan dengan konsumsi rokok. Indonesia telah menjadi negara perokok tertinggi di dunia dengan 67% pria dewasa merokok. Sepertiga anak sekolah telah menjadi perokok yang akan terus diperas kantongnya karena telah menyandu sampai puluhan tahun. Tayangan tersebut justru akan mendorong lebih banyak generasi muda menyandu. Kenaikan cukai dan harga rokok sangat diperlukan agar generasi muda tidak mulai merokok. Menurut studi Abdillah Ahsan dari FEUI, mereka yang sudah ketagihan merokok akan tetap membeli rokok meskipun harga naik sampai Rp 18.000 per bungkus. Perokok baru berhenti jika harga rokok menjadi Rp 50.000 per bungkus. Di Singapura, harga rokok buatan Indonesia mencapai lebih dari Rp 100.000 per bungkus, dengan cukai rokok tinggi yang ditetapkan pemerintah Singapura agar generasi muda tidak menjadi pecandu rokok.

Dalam pandangan kami, **Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (CHEPS)**, Universitas Indonesia, dan menurut data-data resmi Pemerintah, tayangan tersebut didominasi oleh para pendukung industri rokok. Apa alasannya? Informasi menyesatkan yang disampaikan dalam acara tersebut dan bantahan kami adalah:

- Opini **Muhaimin Moefi** (Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia): Muhaimin membandingkan kenaikan cukai rokok pada RAPBN 2016 dengan APBN 2015 (23%), bukan APBN P 2015 (7%)
- **Klarifikasi:** Ini adalah cara mereka yang pro industri rokok membuat kesan seolah-olah kenaikan cukai dalam RAPBN 2016 sangat besar. Padahal kenaikan cukai pada RAPBN 2016 sebenarnya hanya 7%. Dengan menggunakan data konsumsi tembakau tahun 2011 yaitu 279,4 miliar batang, ini berarti harga rokok hanya naik Rp. 35 per batang, Rp 420 per bungkus (1 bungkus 12 batang). Sangat murah. Lebih jauh lagi, kenaikan cukai RAPBN 2016 masih jauh dari dari komitmen negara-negara di dunia. Cukai rokok Indonesia tahun 2014 rata-rata hanya 42%. Masih jauh dari cukai di Thailand (70%),

Brunei Darussalaam (72%) dan Singapura (69%) (Data ASEAN tobacco tax report 2012).

Opini **Hariyadi Sukamdani** (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) : Jika cukai naik, industri pasti kolaps.

- **Klarifikasi:** Antara tahun 2008 -2009, cukai rokok juga dinaikkan pemerintah sebesar rata-rata 7%, faktanya konsumsi rokok tetap naik (Data Kementerian Kesehatan RI 2007 – 2011). Kami mohon Kementerian Keuangan dan Kementrian Industri untuk membuka fakta, perusahaan rokok mana yang tutup tahun-tahun lalu dan industri mana yang volume penjualannya naik? Bukankah penutupan industri rokok tersebut karena mekanisasi dan tidak mampu bersaing dengan industri besar, yang sebagian milik asing?

Opini **Indah Kurnia** (Anggota DPR RI Komisi XI): Lakukan ekstensifikasi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dengan menbebaskan cukai pada smartphone (telepon pintar)

- **Klarifikasi:** Cukai hanya dibebankan kepada barang yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif, karena itu konsumsi barang tersebut harus dikendalikan. Di seluruh dunia, cukai hanya dibebankan pada rokok dan alkohol yang keduanya berbahaya bagi kesehatan dan bersifat adiktif (menimbulkan kecanduan). Smartphone tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Sebaliknya, smartphone sangat membantu memperlancar komunikasi sesama manusia. Maka aneh jika ia mengusulkan cukai untuk telepon pintar.

Opini **Enny Sri Hartati** (Pengamat Ekonomi): Hanya rokok yang selalu dinaikkan cukainya setiap kali pemerintah merevisi RAPBN

- **Klarifikasi:** Pernyataan tersebut sangat memalukan. Sebagai ekonom, seharusnya ia mempelajari bagaimana negara-negara lain memperlakukan cukai rokok dan memahami prinsip-prinsip kebijakan ekonomi atas konsumsi barang berbahaya. Di Indonesia, cukai rokok belum mampu melaksanakan fungsinya mengendalikan konsumsi rokok. Konsumsi rokok di Indonesia meningkat dari 240 milyar batang di tahun 2008 menjadi 279,4 milyar batang di tahun 2011, sedangkan cukai telah naik di kisaran 7% sampai 16% antara tahun 2008 – 2011 (Data Kementrian Kesehatan, 2007 -2011) . Ini adalah fakta bahwa cukai rokok di Indonesia belum mampu mengendalikan konsumsi. Padahal prinsip dasar UU Cukai adalah mengendalikan konsumsi. Oleh karena itu, cukai di Indonesia harus terus dinaikkan, paling tidak sampai cukai semua jenis rokok mencapai batas 57%, sebagaimana ditetapkan UU Cukai tahun 2007. Kita belum mematuhi UU Cukai yang kita buat hampir 10 tahun lalu. Memalukan.

Opini **Enny Sri Hartati** (Pengamat Ekonomi): Dampak kebijakan menaikkan cukai kontradiktif terhadap kinerja sektor riil, mengancam lapangan kerja.

- **Klarifikasi:** Data Statistik Angkatan Kerja BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa porsi pekerja di Industri tembakau terhadap pekerja di seluruh sektor industri hanya 1%. Jumlah pekerja dalam industri tembakau dibanding jumlah seluruh pekerja hanya 0,4% pada tahun 2012. Proporsi petani tembakau terhadap total angkatan kerja hanya 0,5% di tahun 2010. Mengapa porsi yang sangat kecil ini harus diistimewakan oleh para penyaji di TV swasta tersebut. Mengapa tidak petani dan pekerja industri padi/beras yang harus dilindungi dengan UU khusus? Industri rokok kecil, telah dilindungi dengan tidak ada kenaikan cukai di Tahun 2014. Asap rokok mengancam jiwa dan kesejahteraan. Indonesia darurat asap rokok!!!

Opini Enny Sri Hartati (Pengamat Ekonomi): Cukai naik, Rokok Ilegal Meningkat

(Menurut Penelitian Universitas Gadjah Mada)

- **Klarifikasi:** Saat Brazil menaikkan cukai rokok secara bertahap dalam rentang tahun 2006 – 2009, ternyata rokok ilegal malah menurun. Hal yang sama juga terjadi di Kanada antara tahun 1994 sampai 2001 (Hana Ross, 2015). Rokok Ilegal akan selalu ada berapa pun nilai cukai rokok. Pengendalian rokok ilegal tidak tergantung cukai, tapi tergantung seberapa kuat usaha dari penegak hukum untuk mencegahnya.

**Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (CHEPS)**, Universitas Indonesia merekomendasikan beberapa hal di bawah ini sebagai solusi jalan tengah yang menguntungkan semua pihak:

- Revisi Undang – Undang Cukai & Naikkan cukai sampai dengan 70% sesuai dengan komitmen dunia melalui rekomendasi WHO. Kita harus menjadi warga dunia yang patuh.
- Dalam revisi UU Cukai harus disediakan 10% cukai rokok (Rp 15 triliun tahun depan) dikembalikan untuk kesejahteraan petani tembakau dan buruh rokok. Wajibkan Pemerintah untuk menggunakan dana tersebut guna melatih petani dan pekerja rokok meningkatkan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan mereka, yang selama ini tidak menikmati tumbuh suburnya konsumsi rokok. .
- Stop atau kurangi impor daun tembakau.
- Larang mekanisasi industri rokok.

Jakarta, 27 September 2015

-selesai-

Permintaan one-on-one interview dengan ketua CHEPS, Prof. Hasbullah Thabrany dan tentang media rilis, dapat menghubungi: media officer CHEPS, dr. Diah Evasari (email [diah.evasari@cheps.or.id](mailto:diah.evasari@cheps.or.id) atau 0812-86704779).



Mengenai Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS): CHEPS merupakan pusat kajian yang berada di bawah naungan Universitas Indonesia, didirikan pada tanggal 1 Desember 1998. Melalui penelitian dan gerakan advokasinya, CHEPS berupaya memberikan sumbangsih dalam pemecahan masalah kesehatan bangsa.